

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1. Kajian Pustaka

Menurut Nazir (2015:93) menyatakan bahwa studi kepustakaan atau studi literature, selain dari mencari sumber data sekunder yang akan mendukung penelitian, juga diperlukan untuk mengetahui sampai mana ilmu yang berhubungan dengan penelitian telah berkembang, sampai mana terdapat kesimpulan dan generalisasi yang pernah dibuat sehingga situasi yang diperlukan dapat diperoleh. Maka dari itu pada bab ini penulis memaparkan beberapa teori menurut para ahli yang berhubungan dengan variable penelitian yang dilakukan.

2.1.1. Laba Bersih

2.1.1.1. Pengertian Laba Bersih

Laba atau rugi bersih ini memberikan pengguna laporan keuangan sebuah ukuran ringkasan kinerja perusahaan secara keseluruhan selama periode berjalan (yang meliputi aktivitas utama maupun aktivitas sekunder) dan setelah memperhitungkan besarnya pajak penghasilan.

Definisi Menurut Hery (2018:43) Laba bersih adalah Laba sebelum pajak penghasilan yang dikurangkan dengan pajak penghasilan.

Dan Menurut Arini T. Soemohadiwidjojo (2015:46) menyatakan bahwa Laba bersih adalah laba yang diperoleh perusahaan pada periode tahun buku berjalan.

Menurut Kasmir (2015:303) Laba bersih merupakan Laba yang telah dikurangi biaya-biaya yang merupakan beban perusahaan dalam suatu periode tertentu termasuk pajak.

Berdasarkan pengertian menurut para ahli tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa laba bersih adalah laba yang telah dikurangi biaya-biaya perusahaan termasuk biaya bunga dan pajaknya.

2.1.1.2. Pengukuran Laba Bersih

Menurut Hery (2018:43) pengukuran Laba Bersih adalah:

$$\text{Laba Bersih} = \text{Laba sebelum pajak penghasilan} - \text{Pajak penghasilan}$$

Keterangan:

Menurut Herry (2018:43) mengemukakan laba sebelum pajak penghasilan adalah laba yang diperoleh setelah memperhitungkan pendapatan dan beban lainnya, tidak termasuk pajak penghasilan.

Menurut Resmi (2011:74) Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.

2.1.2. Likuiditas

2.1.2.1. Pengertian Likuiditas

Likuiditas sangat mendasar bagi perusahaan. Dalam rutinitas sehari-hari, likuiditas akan tercermin dalam bentuk kemampuan perusahaan dalam membayar kreditor tepat waktu atau membayar gaji tepat waktu.

Menurut Kariyoto (2017:189) definisi likuiditas adalah sebagai berikut:

“Likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya dalam jangka pendek, atau kemampuan

perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan pada waktu ditagih”.

Menurut Harmono (2015:106) menyatakan bahwa Likuiditas dapat diartikan sebagai berikut:

“Kemampuan perusahaan dalam melunasi sejumlah hutang jangka pendek, umumnya kurang dari satu tahun, dimensi konsep likuiditas mencakup current ratio, quick ratio, cash ratio, dan net working capital to total assets ratio. Dimensi konsep likuiditas tersebut mencerminkan ukuran-ukuran kinerja manajemen ditinjau dari sejauh mana manajemen mampu mengelola modal kerja yang didanai dari utang lancar dan saldo kas perusahaan”.

Menurut Kasmir (2014:129) mengatakan bahwa likuiditas adalah sebagai berikut:

“Likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban (utang) jangka pendek. Artinya apabila perusahaan ditagih, perusahaan akan mampu untuk memenuhi utang tersebut terutama utang yang sudah jatuh tempo.”

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam membayar utang-utang jangka pendeknya yang jatuh tempo.

2.1.2.2. Pengukuran Rasio Likuiditas

Likuiditas berhubungan dengan kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendeknya dan kemungkinan perusahaan memiliki masalah dalam memenuhi kewajiban ini.

Menurut Mamduh Hanafi dan Abdul Halim (2016:75) mengatakan bahwa rasio likuiditas adalah:

“rasio likuiditas mengukur kemampuan likuiditas jangka pendek perusahaan dengan melihat aktiva lancar perusahaan relatif terhadap utang lancarnya (utang dalam hal ini adalah kewajiban perusahaan)”.

Menurut Irham Fahmi (2015:121) mengatakan bahwa rasio likuiditas adalah:

“kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu. Rasio ini penting karena kegagalan dalam membayar kewajiban dapat menyebabkan kebangkrutan perusahaan.”

Menurut Hantono (2018:9) rasio yang mengukur kemampuan perusahaan yaitu *Current Ratio* yang menunjukkan jumlah kewajiban lancar yang dijamin pembayarannya oleh aktiva lancar. Semakin tinggi hasil perbandingan aktiva lancar dengan kewajiban lancar, semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk menutupi kewajiban jangka pendeknya.

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Utang Lancar}}$$

Keterangan:

Menurut Riyanto (2010:28) menyatakan bahwa tingkat likuiditas atau current ratio suatu perusahaan dapat dipertinggi dengan cara:

- 1) Dengan utang lancar tertentu, diusahakan untuk menambah aktiva lancar.
- 2) Dengan aktiva lancar tertentu, diusahakan untuk mengurangi jumlah utang lancar.
- 3) Dengan mengurangi jumlah utang lancar sama-sama dengan mengurangi aktiva lancar.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan current ratio. alasan digunakannya rasio lancar secara luas sebagai ukuran likuiditas karena mencakup kemampuan untuk membayar utang yang segera harus dipenuhi kewajiban lancar.

2.1.3. Ukuran Perusahaan

2.1.3.1. Pengertian Ukuran Perusahaan

Dalam skala usaha terdapat berbagai ukuran perusahaan yang berbeda, dari perusahaan kecil hingga perusahaan besar, perbedaan tersebut tergantung pada investasi yang ditanamkan.

Definisi Ukuran Perusahaan menurut Brigham & Houston (2017:4) merupakan ukuran besar kecilnya sebuah perusahaan yang ditunjukkan atau dinilai oleh total asset, total penjualan, jumlah laba, beban pajak dan lain-lain.

Dan menurut Jogiyanto Hartono (2016:685) definisi ukuran perusahaan adalah besar kecilnya perusahaan yang dapat diukur dengan nilai total aktiva atau penjualan bersih atau nilai ekuitas.

Adapun pengertian lain menurut Sujarweni (2015:211) ukuran perusahaan adalah sebagai berikut:

“Ukuran perusahaan dilihat dari total aset yang dimiliki oleh perusahaan yang dapat dipergunakan untuk kegiatan operasi perusahaan. Semakin besar total aset yang dimiliki suatu perusahaan, semakin besar pula ukuran perusahaan. Semakin besar aset maka semakin besar modal yang ditanam, sementara semakin banyak penjualan, maka semakin banyak juga perputaran hutang dalam perusahaan”.

Berdasarkan dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Ukuran Perusahaan merupakan suatu skala yang digunakan untuk mengukur besar kecilnya suatu perusahaan dilihat dalam berbagai cara seperti total asset, total penjualan, nilai pasar saham dan lain-lain.

2.1.3.2. Klasifikasi Ukuran Perusahaan

Klasifikasi ukuran perusahaan menurut UU No.20 Tahun 2008 dibagi kedalam 4 (empat) kategori yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan

usaha besar. Pengertian dari usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar menurut UU No. 20 Tahun 2008 Pasal 1 (Satu) adalah sebagai berikut:

- 1) Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- 2) Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
- 3) Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- 4) Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Adapun kriteria ukuran perusahaan yang diatur dalam UU No. 20 tahun 2008 :

Tabel 2.1
Kriteria Ukuran Perusahaan

Ukuran Perusahaan	Kriteria	
	Aset (tidak termasuk tanah & bangunan tempat usaha)	Penjualan Tahunan
Usaha Mikro	Maksimal 50 Juta	Maksimal 300 Juta
Usaha Kecil	>50 Juta – 500 Juta	>300 Juta - 2,5 M
Usaha Menengah	>10 Juta – 10 M	2,5 M – 50 M
Usaha Besar	>10 Juta	>50 M

2.1.3.3. Pengukuran Ukuran Perusahaan

Pengukuran yang digunakan untuk mengukur ukuran perusahaan menurut Hartono (2015:282) adalah diukur dengan perhitungan logaritma dari total aktiva :

$$Ukuran\ Perusahaan\ (Size) = Ln(Total\ Assets)$$

Keterangan :

Menurut Sudarmaji dan Sularto (2007), Logaritma natural dipilih untuk meratakan data atau menghindari rentang data yang terlalu jauh. Total asset dipilih dengan mempertimbangkan bahwa nilai asset relatif lebih stabil.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan dalam menentukan ukuran perusahaan digunakan ukuran aktiva. Ukuran aktiva tersebut diukur sebagai logaritma dari total aktiva. Logaritma digunakan untuk memperhalus aset tersebut yang sangat besar dibanding variabel keuangan lainnya.

2.1.4. Kebijakan Dividen

2.1.4.1. Pengertian Dividen

Dividen yaitu pendistribusian laba secara proporsional kepada para pemegang saham sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Dividen juga merupakan salah satu motivasi untuk menanamkan dana di pasar modal bagi investor.

Menurut Ni Luh Gede Erni Sulindawati (2017:127) definisi dividen merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan.

Dan menurut Musthafa (2017:142) mendefinisikan dividen sebagai bagian dari keuntungan yang dibagikan kepada pemegang saham yang dapat berupa dividen tunai atau dividen saham.

Sedangkan Menurut Said Kelana dan Chandra Wijaya (2015:134) dividen merupakan:

“Bagian pendapatan yang diterima oleh pemegang saham, biasanya perusahaan membagi dividen setelah mendapatkan laba akhir (EAT). Bagian laba akhir yang tidak dibagikan, diakumulasikan menjadi saldo laba (Retained Earning). Dividen dibayar pada umumnya berupa kas.”

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa dividen merupakan pembagian laba yang dihasilkan perusahaan kepada para pemegang saham.

2.1.4.2. Jenis Dividen

Menurut Wibowo dan Abubakar Arief (2016: 61) jenis dividen yang dapat dibagikan oleh perusahaan kepada pemegang sahamnya sebagai berikut:

- 1) Dividen Tunai, yaitu bagian laba usaha yang dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk uang tunai. Sebelum dividen dibagikan, perusahaan harus mempertimbangkan ketersediaan dana untuk membayar dividen. Jika perusahaan memilih untuk membagikan dividen tunai itu berarti pada saat dividen akan dibagikan kepada pemegang saham perusahaan memiliki uang tunai dalam jumlah yang cukup.
- 2) Dividen Harta, yaitu bagian dari laba usaha perusahaan yang dibagikan dalam bentuk harta selain kas. Walaupun dapat berbentuk harta lain, tetapi biasanya harta tersebut dalam bentuk surat berharga yang dimiliki oleh perusahaan.
- 3) Dividen Skrip atau Dividen Utang, yaitu bagian dari laba usaha perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk janji tertulis untuk membayar sejumlah uang dimasa datang. Dividen skrip terjadi karena perusahaan ingin membagikan dividen dalam bentuk uang tunai, tetapi tidak tersedia kas yang cukup, walupun laba ditahan menunjukkan saldo yang cukup. Karena itu, pihak manajemen perusahaan menjanjikan untuk membayar sejumlah uang di masa mendatang kepada para pemegang saham.
- 4) Dividen Saham, yaitu bagian dari laba usaha yang ingin dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk saham baru perusahaan itu sendiri. Dividen saham dibagikan karena perusahaan ingin mengkapitalisasi sebagian laba usaha yang diperolehnya secara permanen.

- 5) Dividen Likuidasi, yaitu dividen yang ingin dibayarkan oleh perusahaan kepada pemegang saham dalam berbagai bentuknya, tetapi tidak didasarkan pada besarnya laba usaha atau saldo laba ditahan perusahaan. Dividen likuidasi merupakan pengembalian modal atas investasi pemilik oleh perusahaan.

Dari beberapa jenis dividen tersebut, dapat disimpulkan bahwa jenis pembayaran dividen yang paling umum dilakukan oleh perusahaan adalah pembayaran dalam bentuk tunai yang dibayarkan kepada pemegang sahamnya.

2.1.4.3. Pengertian Kebijakan Dividen

Banyaknya dividen yang akan dibagi kepada pemegang saham tergantung pada laba yang dihasilkan perusahaan dan bentuk kebijakan dividen yang diterapkan oleh perusahaan yang bersangkutan.

Menurut Muhamad Yunanto (2015:39) Definisi kebijakan dividen sebagai berikut:

“Kebijakan dividen merupakan kebijakan untuk menentukan berapa laba yang harus dibayarkan berupa dividen kepada investor dan berapa banyak laba yang harus dijadikan laba ditahan untuk menambah modal dalam pembiayaan investasi dimasa yang akan datang.”

Dan menurut Musthafa (2017:141) mendefinisikan kebijakan dividen sebagai berikut:

“Kebijakan Dividen adalah mencangkup keputusan mengenai apakah laba yang diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada pemegang saham atau akan ditahan untuk reinvestasi dalam perusahaan.”

Sedangkan Harmono (2017:12) mendefinisikan kebijakan dividen sebagai berikut:

“Persentase laba yang dibayarkan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen tunai, penjagaan stabilitas dividen dari waktu ke waktu, pembagian dividen saham, dan pembelian kembali saham.”

Berdasarkan beberapa pengertian menurut para ahli di atas, dapat dikatakan bahwa kebijakan dividen adalah suatu kebijakan untuk menentukan sebuah keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan akan dibagikan sebagai dividen atau sebagai laba ditahan.

2.1.4.4. Pengukuran Kebijakan Dividen

Adapun Pengukuran kebijakan dividen menurut Hery (2016:145), yaitu sebagai berikut:

$$\text{DPR} = \frac{\text{Dividend Per Share}}{\text{Earning Per Share}}$$

Sebelum menilai *Dividen Payout Ratio* (DPR), ada baiknya investor mengetahui komponen penting yang terdapat di dalamnya, komponen tersebut adalah:

- 1) *Dividen payout ratio* (DPR) adalah jumlah dividen yang dibayarkan relatif terhadap pendapatan bersih perusahaan atau pendapatan tiap lembar saham.
- 2) *Dividen Per Share* (DPS) merupakan rasio yang menggambarkan seberapa besar dividen yang diperoleh per lembar saham yang dimiliki oleh investor.
- 3) *Earning per share* (EPS) atau pendapatan per lembar saham adalah bentuk pemberian keuntungan yang diberikan kepada para pemegang saham dari setiap lembar saham yang dimiliki.

Dalam penelitian ini, penulis mengukur kebijakan dividen dengan *dividend payout ratio* karena rasio ini lebih dapat menggambarkan perilaku oportunistik manajerial yaitu dengan melihat berapa besar keuntungan yang dibagikan kepada shareholders sebagai dividen dan seberapa besar yang disimpan oleh perusahaan.

2.2. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis hubungan antara variabel yang akan diteliti. kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai masalah yang penting dan penjelasan sementara terhadap gejala-gejala yang menjadi objek permasalahan. Kebijakan pembagian dividen merupakan keputusan apabila laba yang diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau akan ditahan dalam laba ditahan guna pembiayaan investasi di masa datang. Apabila perusahaan memutuskan untuk membagi laba yang diperoleh sebagai dividen berarti akan mengurangi jumlah laba ditahan yang akhirnya mengurangi sumber dana intern yang akan digunakan untuk mengembangkan perusahaan. Pada sisi lain, apabila perusahaan tidak membagikan labanya sebagai dividen akan dapat memperbesar sumber dana intern perusahaan dan akan meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan perusahaan.

2.2.1. Pengaruh Laba Bersih terhadap Kebijakan Dividen

Menurut Hery (2016 : 287) menyatakan sebagai berikut:

“Perusahaan yang memiliki tingkat akumulasi laba bersih yang cukup baik, dari satu periode ke periode berikutnya, biasanya memiliki potensial untuk membagikan sebagian dari laba bersih tersebut kepada pemilik perusahaan. Jika perusahaan memperoleh

laba besar, maka perusahaan akan dapat membagikan dividen dalam jumlah besar dan harga saham diharapkan akan meningkat.

Menurut Sutrisno (2016: 38) menyatakan semakin besar laba bersih yang diperoleh, maka semakin besar dividen yang dibayarkan, demikian pula sebaliknya bila laba kecil dividen yang dibayarkan juga kecil.

Pernyataan diatas didukung oleh hasil penelitian dari Nining Mulyaningsih dan Dwi Rahayu (2016) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa laba bersih berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen. Dan dalam penelitian Asep Basuki (2018) menyebutkan laba bersih berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Karena semakin besar laba yang diperoleh perusahaan maka akan semakin tinggi dividen yang akan dibagikan. Adanya pengaruh laba bersih terhadap kebijakan dividen membuktikan pembagian dividen menjadikan laba bersih sebagai acuan dalam mengukur laba yang diperoleh perusahaan.

2.2.2. Pengaruh Likuiditas terhadap Kebijakan Dividen

Likuiditas yang di ukur dengan current ratio dalam penelitian ini yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau hutang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan dengan melihat aset lancar yang tersedia untuk menutupi kewajiban jangka pendek yang segera jatuh tempo.

Menurut Danang Sunyoto dan Fathonah Eka (2015:168) hubungan likuiditas antara kebijakan dividen menyebutkan bahwa:

“Likuiditas perusahaan merupakan pertimbangan utama dalam banyak kebijakan dividen. Karena dividen bagi perusahaan merupakan kas keluar, maka semakin besar posisi kas dan likuiditas perusahaan secara keseluruhan akan semakin besar kemampuan perusahaan untuk membayar dividen.”

Menurut Kasmir (2014:110) hubungan likuiditas antara kebijakan dividen menyebutkan bahwa:

“Rasio likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban (utang) jangka pendek, dikatakan perusahaan tersebut likuid. Semakin likuid sebuah perusahaan, kemungkinan pembayaran dividen yang di lakukan perusahaan akan semakin besar.”

Pernyataan diatas didukung oleh hasil penelitian Keukeu Firda Lestari (2016), menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Dan dalam penelitian Budi Wahono (2018) menyebutkan likuiditas berpengaruh positif signifikan terhadap kebijakan dividen. Semakin tinggi posisi likuiditas yang dimiliki perusahaan, menandakan bahwa semakin besar kas perusahaan yang tersedia setelah membayarkan kewajiban jangka pendeknya sehingga pembayaran dividen yang dilakukan perusahaan akan semakin besar.

2.2.3. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Kebijakan Dividen

Ukuran perusahaan merupakan gambaran besar atau kecilnya suatu perusahaan. Besarnya ukuran perusahaan dapat dinyatakan dalam total aktiva. Perusahaan besar cenderung menghasilkan laba yang besar dan menentukan tingkat dividen yang stabil.

Menurut Hanafi (2014:375) menyatakan hubungan ukuran perusahaan antara kebijakan dividen sebagai berikut:

“Jika perusahaan mempunyai akses ke pasar keuangan yang baik, perusahaan tersebut dapat membayar dividen lebih tinggi. Karena ukuran perusahaan yang besar akan mempunyai dividen payout ratio yang tinggi, karena perusahaan tersebut dengan mudah mendapatkan dana. Kemampuan perusahaan membayar dividen yang tinggi memberikan informasi kepada investor tentang prospek perusahaan.

Menurut Brigham dan Houston (2010:119) menyatakan hubungan ukuran perusahaan antara kebijakan dividen sebagai berikut:

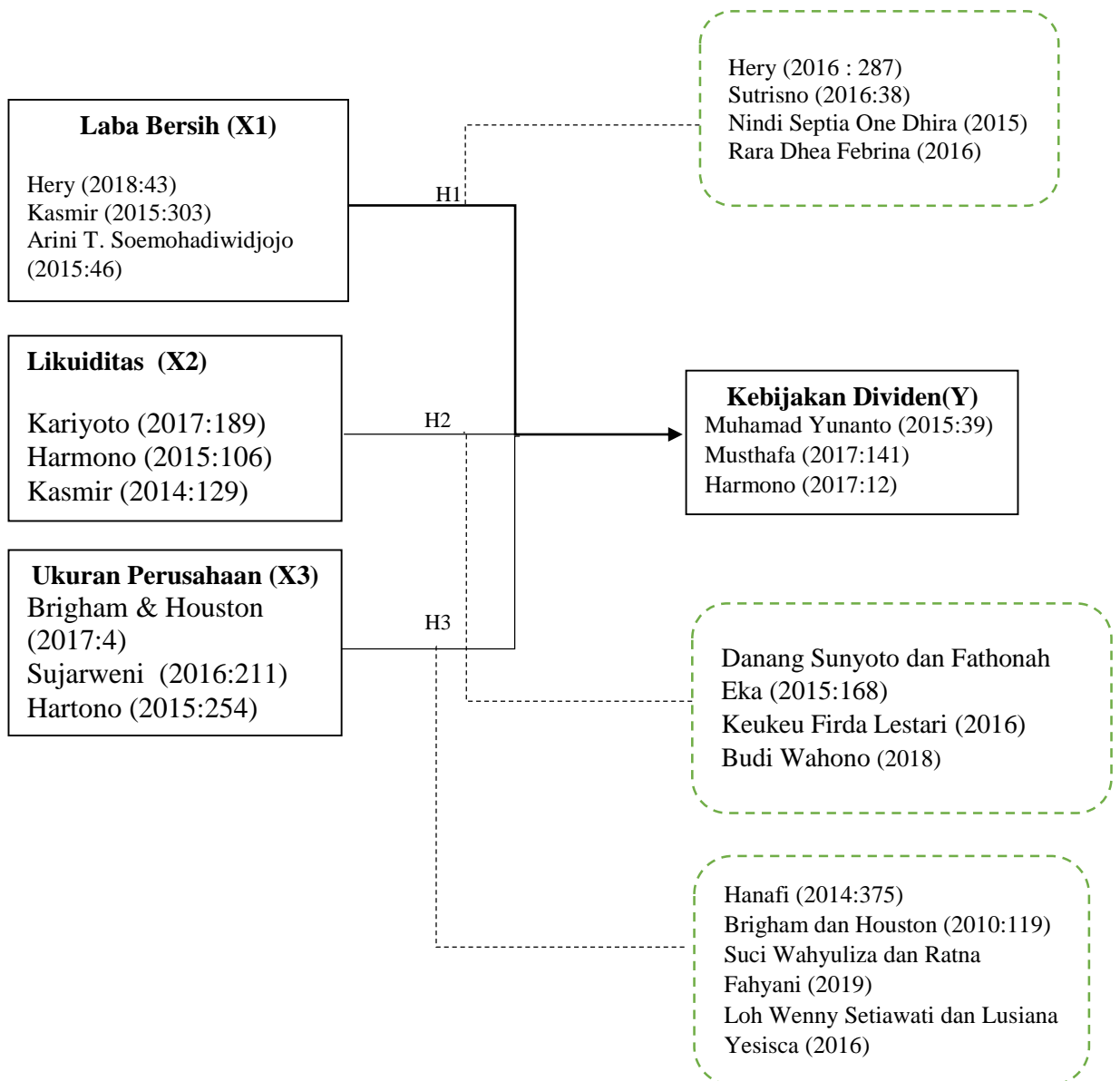
“Ukuran perusahaan sebagai rata-rata total aktiva untuk tahun bersangkutan sampai beberapa tahun. Perusahaan dengan asset yang besar lebih cepat mendiversifikasikan hutang yang lebih besar dan menekan financial dibanding dengan perusahaan yang memiliki asset kecil. Sehingga ukuran perusahaan (firm size) mempunyai pengaruh positif terhadap dividend payout ratio.

Teori diatas didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Suci Wahyuliza dan Ratna Fahyani (2019) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Dan dalam penelitian Loh Wenny Setiawati dan Lusiana Yesisca (2016) menyebutkan ukuran perusahaan mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dividen. Bahwa Ukuran perusahaan berkaitan besar pengaruhnya dengan kemampuan dividen dibagikan. Semakin besar ukuran perusahaan, semakin besar pula perusahaan membagikan dividen.

2.2.4. Paradigma Penelitian

Variable penelitian ini terdiri dari variable dependen nilai perusahaan. Variable independen yaitu kebijakan hutang dan ukuran perusahaan.

Maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.3. Hipotesis

Menurut Sugiyono (2017:93) Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka perlu dilakukannya pengujian hipotesis untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Penulis menyimpulkan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1 = Terdapat Pengaruh Laba Bersih terhadap Kebijakan Dividen

H2 = Terdapat Pengaruh Likuiditas terhadap Kebijakan Dividen

H3 = Terdapat Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Kebijakan Dividen